

Kepala BRR Regional I

Dana Rehab Akan Cair April 2008

MEULABOH-Kepala BRR Regional I, Ruslan Abd Gani mengungkapkan proses dana rehabilitasi rumah untuk korban gempa dan gelombang tsunami Desember 2004 lalu, adalah ditangani oleh Deputi Perumahan BRR NAD-Nias di Banda Aceh. "Dana rehab itu ditangani deputi perumahan," kata Ruslan menjawab *Serambi*, Senin (25/2).

Penjelasan itu diutarakan Kepala BRR Regional I sehubungan aksi protes sejumlah korban gempa bumi dan gelombang tsunami di Kabupaten Aceh Barat yang menyebutkan dana rehab jatah mereka hingga kini belum kunjung cair meski sudah pernah didata.

Bahkan ada di antara warga mengaku sudah pernah melakukan tanda tangan di atas materai sebagai bukti akan menerima bantuan. Menurut

Ruslan, sesuai koordinasi pihaknya dengan deputi perumahan terhadap masalah dana itu kini masih dalam tahap verifikasi calon penerima.

Menurut Ruslan, dana rehab itu masa cair hingga April 2008 sehingga

April nanti diharapkan selesai. Menurut Kepala BRR Regional yang antara lain membawahi Distrik Aceh Barat dan Aceh Jaya itu, selain korban dari Aceh Barat, beberapa wilayah lain yaitu Aceh Jaya dan Banda Aceh juga belum menerima dana dimaksud. "Seluruh Aceh juga belum menerima dana itu, ya akan dibantu Rp 2,5 juta," kata Ruslan.

Seperti diberikatan puluhan ibu-ibu rumah tangga warga Desa Ujong Baroh, Meulaboh pada Rabu pekan lalu melancarkan aksi demo ke Kantor BRR

Distrik Aceh Barat menuntut dana rehab yang hingga kini belum cair. Dan kedatangan para korban tsunami itu juga meminta kepastian proses pencairan akan tetapi hingga kini masih kabur. Dan kondisi menyedihkan juga diutarakan korban ada di antara mereka sudah pernah melakukan tanda tangan di atas materai sebagai calon penerima, akan tetapi dana belum ada kepastian.

Sementara Kepala BRR Distrik Aceh Barat, M Mahyuddin Daim mengaku semua desa di Aceh Barat yang dana rehab belum dapat dan semua kebijakan mengenai dana dimaksud diputuskan oleh BRR di Banda Aceh oleh Deputi Perumahan. Namun ia berjanji akan kembali menyampaikan harapan dan tuntutan warga terhadap dana rehab ke BRR di Banda Aceh. (riz)

Zona Barat | 17

Terkait Dana Rehab Rumah

Warga Mengaku Sudah Teken Tanda Terima

MEULABOH - Sejumlah warga di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat menyatakan hingga kini proses pencairan dana rehab rumah bantuan BRR NAD-nias belum dicairkan sehingga mereka kecewa. Bahkan di antara korban gempa bumi dan tsunami itu, mengaku untuk mendapat dana dimaksud sudah pernah melakukan tanda tangan menggunakan materai sebagai bukti akan menerima bantuan dana rehab, akan tetapi masih kabur.

Bustami, warga Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan mengatakan untuk mendapatkan dana rehab bebera-

pa waktu lalu sekitar awal tahun 2007, pihak pendata BRR NAD-Nias di Meulaboh sudah pernah melakukan tanda tangan kepada warga dengan menggunakan materai.

"Yang sangat disesalkan uangnya hingga kini masih belum cair. Kami sangat berharap dana itu bisa segera cair," katanya kepada *Serambi*, Sabtu (23/2).

Diakuinya, selain dirinya mengalami hal serupa yakni pernah melakukan tanda tangan menggunakan materai, seluruh warga Suak Ribee yang didata dapat dana rehab juga mengalami hal serupa.

Makanya, terhadap hara-

pan segera cair dana rehab sudah beberapa kali disampaikan kepada BRR NAD-Nias Kantor di Meulaboh, akan tetapi hingga kini tidak ada jawaban. Oleh karena itu, dia meminta dana jatah mereka yang sudah lama dinanti-nantikan bisa segera dicairkan.

Kondisi kekecewaan juga diutarakan kembali warga Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan yang menyatakan BRR NAD-Nias terkesan lambat dalam mengatasi masalah korban tsunami.

"Sebagai bukti kekecewaan kami sudah mendatangi BRR pada Rabu lalu. Dana itu sudah

sangat kami dambakan untuk merehab rumah yang rusak," ujar beberapa ibu rumah di desa setempat, kemarin.

Sementara itu, Kepala BRR Distrik Aceh Barat, M Mahyuddin Daim mengaku semua desa di Aceh Barat yang dana rehab semuanya belum dapat dan kebijakan mengenai dana dimaksud diputuskan oleh BRR di Banda Aceh. Namun dia berjanji akan kembali menyampaikan harapan dan tuntutan warga terhadap dana rehab ke BRR di Banda Aceh. "Kebijakan masalah dana rehab itu diputuskan di BRR pusat oleh Deputi Perumahan," kata Mahyuddin. (riz)

Dana Rehab tak Jelas BRR Dinilai Abaikan Rakyat

MEULABOH - Sejumlah kalangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat menilai BRR NAD-Nias terkesan mengabaikan amanah rakyat. Buktinya masyarakat korban tsunami yang rumahnya rusak akibat musibah tsunami pada 2004 lalu, sehingga akan dibantu dana, hingga kini belum direalisasikan bantuan dana rehab.

Demikian antara lain diutarakan Direktur LSM GSF Meulaboh, Abdul Jalil kepada Serambi, Jumat (22/2). Menurut Jalil, BRR NAD-Nias di Banda Aceh seharusnya memberikan kepastian terhadap dana rehab itu. Sebab masyarakat sudah sangat menantikan pascamusibah 2004 lalu, terlebih sudah dilakukan pendataan.

"Dengan belum jelasnya dana rehab menunjukkan BRR terkesan seperti mengabaikan amanah rakyat," ungkap Jalil.

Selain masalah dana rehab, Jalil juga menilai masih banyak pengerjaan rekonstruksi atau rehabilitasi yang harusnya dilakukan, akan tetapi terkesan dibiarkan seperti perkuburan massal yang kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, BRR harus memacu pembangunan kembali Aceh dengan baik dan

cepat sehingga dengan target yang sudah direncanakan akan terealisasi dengan baik.

Seperti diberitakan, sekitar 50 ibu-ibu rumah tangga warga Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Rabu (20/2) mendatangi Kantor BRR Distrik Aceh Barat menyampai kekecewaan menyusul hingga kini belum cairnya dana rehab rumah. Selain itu korban gempa bumi dan gelombang tsunami itu juga menuding pejabat BRR NAD-Nias terkesan buang badan kerana tidak bisa memberikan kepastian proses pencairan dana bantuan itu meski mereka sudah pernah didata beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala BRR Distrik Aceh Barat, M Mahyuddin Daim mengaku semua desa di Aceh Barat yang dana rehab semuanya belum dapat dan kebijakan mengenai dana dimaksud diputuskan oleh BRR di Banda Aceh. Namun dia berjanji akan kembali menyampaikan harapan dan tuntutan warga terhadap dana rehab ke BRR di Banda Aceh. "Kebijakan masalah dana rehab itu diputuskan di BRR pusat oleh Deputy Perumahan," kata Mahyuddin. (riz)